

KEPEMIMPINAN PRAKOLONIAL DALAM NAGARA KRTAGAMA DAN BABAD TANAH JAWI

PRE-COLONIAL LEADERSHIP IN NAGARA KRTAGAMA AND BABAD TANAH JAWI

Saifur Rohman

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta
Pos-el: saifur rohman2000 yahoo.com

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan representasi kepemimpinan dalam dua naskah, *Nagara Krtagama* (1365) dan *Babad Tanah Jawi* (1788). Saya berargumen bahwa Negara Krtagama merepresentasikan kepemimpinan Kerajaan Majapahit, sedangkan Babad Tanah Jawi merepresentasikan kepemimpinan Kesultanan Demak, Mataram, dan Pajang. Pertimbangan interdisipliner –melibatkan kajian filsafat, psikologi, sastra, dan budaya– membantu saya untuk memformulasikan anggitan kepemimpinan pascakolonial dalam tubuh pemerintah Indonesia yang masih memobilisasi konsep kepemimpinan prakolonial. Dengan menggunakan metode semiotika dan heuristik, saya menemukan lima elemen kepemimpinan prakolonial, yakni: (1) sumber legitimasi; (2) nilai bersama sebagai norma; (3) media komunikasi; (4) strategi kepemimpinan; dan, (5) pemecahan masalah. Saya menyimpulkan bahwa strategi kepemimpinan lampau yang digunakan dalam kepemimpinan masa kini merupakan indikasi simptomatik kepemimpinan prakolonial Mataram. Karakteristiknya adalah manipulasi legitimasi, kurangnya kesadaran moral, dan berdasarkan permainan kuasa.

Kata kunci: *Nagara Krtagama*, *Babad Tanah Jawi*, kepemimpinan prakolonial

Abstract

This article discusses representation of leadership in two manuscripts, *Nagara Krtagama* (1365) and *Babad Tanah Jawi* (1788). I argue that *Nagara Krtagama* represents leadership of Majapahit kingdom, while *Babad Tanah Jawi* represents leadership of Demak, Mataram, and Pajang sultanate. Interdisciplinary accounts –involving philosophy, psychology, literature, and cultural studies– help me to formulate construction of postcolonial leadership in postcolonial Indonesian governments that still have mobilized pre-colonial leadership concepts. By using semiotic and heuristic method, I find five elements of pre-colonial leadership, namely: (1) legitimacy sources; (2) shared values as norms; (3) communication media; (4) leadership strategy; and, (5) problem solving. I conclude that the older leadership strategy used in the recent leadership model is symptomatic indication of Mataram's pre-colonial leadership. Its characteristics are legitimacy manipulation, less morality awareness, and based on power play.

Keywords: *Nagara Krtagama*, *Babad Tanah Jawi*, precolonial leadership

A. Pendahuluan

Laporan *Kompas* yang berjudul "Indonesia Kian Dekati Negara Gagal" (7/3/11) menunjukkan gejala kelemahan

sistem reproduksi kepemimpinan pasca-Orde Baru. Perubahan yang sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun hanya menyalakan kepemimpinan yang tidak

mampu memecahkan masalah-masalah mendesak dan gagal memproduksi sistem kepemimpinan kuat dan bisa dipercaya.

Artikel ini mengkaji kepemimpinan yang terdapat pada *Kakawin Dēśa Warṇana uthawi Nāgara Kṛtagama* (selanjutnya disingkat NK) dan *Babad Tanah Jawi* (kemudian disingkat BTJ) kemudian direfleksikan untuk kepemimpinan masa kini. NK diasumsikan sebagai representasi ideologi Hindhu-Buddha yang jejak-jejak pikirannya dapat ditemukan dalam Pancasila. BTJ diasumsikan sebagai representasi dari ideologi Islam yang jejak-jejaknya dapat ditemui dalam mayoritas masyarakat Indonesia sekarang. Konstruksi kepemimpinan yang dihasilkan oleh dua representasi itu sangat bermanfaat sebagai dasar penjelasan terhadap model kepemimpinan masa kini.

Kajian kepemimpinan dalam NK dan BTJ dilakukan untuk mencari keselarasan kepemimpinan masa lalu dengan kepemimpinan masa kini. Kajian masa kini memberikan petunjuk tentang keterputusan konsep-konsep kepemimpinan masa lalu. Dengan demikian, penelitian-penelitian psikologi Barat tentang kepemimpinan sebagaimana dilaporkan oleh Gene Klann (2007), R. Mai dan Ackerson (2003), dan Richard W. Paul (2002) belum tentu sesuai dengan konteks Indonesia.

Perspektif kepemimpinan memanfaatkan hasil pembacaan terhadap Gene Klann (2007), R. Mai dan Ackerson (2003), dan Richard W. Paul (2002), yang menyatakan terdapat empat hal yang menjadi tolok ukur kepemimpinan yang efektif. Pertama, sebagai navigator yang menunjukkan arah perubahan dalam sebuah kelompok. Kedua, sebagai agen kecerdasan, yakni memberikan prioritas kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berkelanjutan. Ketiga, sebagai pembangun komunitas, yakni membangun jaringan dengan orang-orang terbaik dengan cara penciptaan cerita untuk tujuan-tujuan bersama. Keempat, sebagai agen perubahan yang bermakna bahwa pemimpin haruslah mampu merespons perubahan-perubahan

melalui antisipasi-antisipasi yang paling mungkin.

Empat hal itu pula yang memengaruhi *The Ary Suta Center Series on Strategic Management* untuk menyusun kinerja kepemimpinan. Berdasarkan makalah berjudul "Role of Intelligence in Leadership Communication", dia mempertanyakan modus-modus komunikasi pemimpin yang sedang terjadi. Sebagai contoh, kasus-kasus besar yang terjadi di lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif merupakan cermin lemahnya kemampuan para pemimpin. Karena itu, dia ber-simpulan: "Kinerja seorang pemimpin (*leadership performance*) dapat ditentukan dari bagaimana cara pemimpin tersebut membangun hubungan (*relationship building*) dengan menjalankan fungsinya sebagai navigator, agen dari kecerdasan bagi pengikutnya (*agent of intelligence*), *community developer*, dan agen perubahan (*agent of change*)" (Suta, 2010:20).

Masalah utama yang hendak dikaji dalam artikel ini adalah apa koherensi kepemimpinan prakolonial dalam konstruksi kepemimpinan masa kini? Berdasarkan framing masalah di atas, relevansi konsep-konsep kepemimpinan dalam konteks Indonesia itu menjadi sangat perlu dibing-kai melalui konsep kepemimpinan yang didasarkan pada dua teks di atas.

Hasil kajian ini dijelaskan melalui (1) deskripsi atas dua teks sebagai objek kajian, (2) model kepemimpinan dari dua teks, dan (3) relevansi dengan kepemimpinan masa kini. Temuan mengangkat lima hal, yaitu: (1) legitimasi pemimpin, (2) perilaku pemimpin, (3) medium komunikasi, (4) nilai-nilai dasar anggota kelompok, dan (5) kasus-kasus situasional dalam proses kepemimpinan. Konfirmasi faktual itu dilakukan melalui pembacaan naratif untuk menghasilkan sekuen sebagai satuan-satuan dalam cerita sebagai satu sistem. Hasil pembacaan terhadap masing-masing teks dibandingkan di dalam sebuah bagan. Keluaran yang diharapkan adalah sebuah model kepemimpinan yang bisa dijadikan

sebagai paradigma dalam pemahaman kepemimpinan.

B. Kepemimpinan dalam Nagara Krtagama

Nagara Krtagama (NK) adalah sebuah buku yang secara umum berisi sejarah politik, sosial, dan tata pemerintahan pada masa abad ke-14, pada masa keemasan kerajaan Majapahit. Naskah NK telah diakui oleh badan dunia UNESCO dan terdaftar dalam *The Memory of the World Regional Register for Asia/ Pacific* (Kompas, 24 Mei 2008). Judul lengkapnya adalah *Kakawin Desa Warnnana uthawi Nagara Krtagama*. Secara etimologis, kata *kakawin* berarti sebuah karya tulis dalam bahasa Kawi yang menggunakan bentuk, ritme, dan suku kata tertentu. Kata *desa* berarti wilayah, kata *warnnana* berarti aneka ragam. Sementara itu, kata *nagara* berarti negara, *krta* berarti kejayaan dan *gama* berarti agama. Terjemahan bebasnya mengacu pada arti *penulisan berbagai daerah atau negara berdasarkan tradisi agama yang suci* (Riana, 2009:x). Karya ini ditulis oleh Mpu Prapanca, seorang pujangga istana Majapahit, pada 1365 (1287 Saka) ini dan pertama kali ditemukan 1894 oleh J.L.A. Brandes, seorang staf bidang kebudayaan pemerintahan Belanda (Slametmuljana, 1979:37).

Cerita dalam NK dibagi dalam wirama atau pembaitan yang dalam sastra Jawa baru disebut *pupuh*. Pembaitan itu menggunakan irama, jumlah suku kata, serta baris yang mengikuti pola-pola tertentu sehingga bisa dinyanyikan. Wirama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti "ritme" (Zoetmulder, 2004:1444). Menurut Riana, NK terdiri atas 386 bait dan masing-masing bait terdiri atas 4 baris. Ada 98 bagian dan 41 wirama (pola puisi). Hasil penelitian Riana dimanfaatkan untuk menyusun sekuen cerita objek penelitian.

1. Legitimasi: Pemimpin Titisan Dewa

Kepemimpinan dalam *Nagara Krtagama* didasarkan pada nilai-nilai yang dipercayai masyarakat. Masyarakat membutuhkan sosok yang adikodrati, yang memberikan bukti-bukti atas apa yang dipercayai selama ini. Sementara itu, masyarakat pada abad ke-10 hingga abad ke-13 didominasi oleh kepercayaan Hindu dan Buddha. Teologi atas kepercayaan ini bertumpu pada deskripsi tentang kehadiran dewa di kayangan. Dewa ini mengatur jalannya alam raya. Hal-hal terkecil di dalam fenomena sosial dianggap sebagai manifestasi dari pengaturan alam raya.

Raja Hayam Wuruk lahir di Kahuripan pada 1334 Masehi (Riana, 2009:54). Penulis NK (Mpu Prapanca) menyamakan model kepemimpinannya dengan Sang Hyang Giri Pati sebagai pelindung jagat raya. Dia dianggap sebagai titisan dari Sang Hyang Giri Nata yang bersemayam di Gunung Semeru. Titisan adalah perwujudan dari abstraksi tentang segala sesuatu. Secara kognitif, Raja Hayamwuruk dianggap "Menguasai segala hal yang rahasia dalam filosofi aliran Wisnawa." Hayamwuruk digambarkan sebagai Dewa Kekayaan memiliki banyak pengetahuan dan mampu meredam segala marabahaya (Riana, 2009:5). Pencitraan yang terbangun ditulis dengan istilah raja digambarkan sebagai "*dewa mangindhha rat juga siran lumanglangi jagat*" bermakna penjelmaan dewa yang sedang mengelilingi dunia.

2. Strategi: Pelestarian Norma

Strategi adalah cara-cara untuk mencapai tujuan yang diungkapkan secara langsung maupun tidak langsung. Strategi kepemimpinan dalam NK tampak dalam kebijakan-kebijakan yang diterapkan terhadap rakyatnya. Strategi itu dinamakan dengan *Sahana Kadhyaksa* (tugas-tugas kepemimpinan) (Riana, 2009:59).

Bagi Hayam Wuruk, kepemimpinan memerlukan habitat supaya lestari. Digambarkan hubungan antara pemimpin

dan anggota ibaratnya adalah antara singa dan hutan. Keraton adalah singa sedangkan wilayah adalah hutan. Bila wilayah (desa-desa) itu rusak, negeri (keraton) akan kekurangan bahan pangan, bila tidak ada alat negara yang kuat pasti negara luar mudah menyerangnya, karena itu, pelihara dan pertahankan keduanya agar berhasil perintahku (Riana, 2009:421). Visi kepemimpinan terlihat jelas, yakni harus berhasil menghilangkan kesengsaraan rakyat (Riana, 2009:53). Dikatakan pula bahwa Baginda Raja telah "masyhur keutamaannya menyejahterakan rakyat, murah hati pada orang miskin, pengasih pada orang menderita, sungguh penjelmaan dewa" (Riana, 2009:192).

Guna pencapaian itu, habitat yang dibangun adalah terbentuknya wilayah kesatuan. Itu berarti, konsepsi politik dalam kepemimpinan Jawa berada pada wilayah kesatuan (*nagara tunggalan*), yakni dalam satu wilayah Mapajahit. Bila ada pemberontakan, langkahnya adalah "semua dimusnahkan oleh angkatan laut bersama para perwira yang telah berjasa" (Riana, 2009:110). Tujuan penyatuan adalah sebagai berikut.

- a. Peningkatan kekayaan. Hal itu teruang dalam kutipan: "Meningkatkan kekayaan Baginda Raja hasilnya untuk biaya penyelenggaraan negara (Riana, 2009:418)."
- b. Pengumpulan pajak. Majapahit sebagai sebuah kelompok memiliki sumber dana yang otonom melalui pajak. Hal itu terlihat dalam kutipan: "Desa-desa dalam wilayah negeri menyerahkan pajak bagaikan air mengalir dipersembahkan menurut aturan" (Riana, 2009:69).
- c. Menjamin kebesaran dan kelestarian organisasi. Kelestarian itu melalui norma-norma yang terbentuk. Penyatuan itu dilakukan "Agar berhasil perintah baginda ke mana pun disuruh pergi, menegakkan agama Siwa sehingga tidak menyimpang (Riana, 2009:106)."

Tujuan tersebut diterapkan melalui sejumlah kebijakan politik berikut.

- a. Penetapan daerah-daerah spiritual keagamaan, yakni tempat karesian.

Keistimewaan yang dimiliki adalah bebas pajak (Riana, 2009:369).

- b. Perlindungan terhadap figur pemimpin dan cendekiawan. Bagi Hayam Wuruk, "Semua orang utama dan orang bijak apa pun jenisnya semua dilindungi dan dijaga" (Riana, 2009: 384).
- c. Pemberian fasilitas terhadap para penjaga moralitas. Dalam NK disebutkan bahwa Raja selalu "Menentramkan para pertapa di pantai di gunung di hutan di semua tempat diawasi agar aman melaksanakan tapa brata semadi memohonkan keselamatan dunia (Riana, 2009:385).
- d. Pemberian piagam terhadap prestasi spiritual. Disebutkan, Baginda amat besar minatnya agar tegak tiga mazhab keagamaan (tripaksa) di Jawa. Ditulis pula, Baginda dari awal giat menulis dalam piagam agar tetap diindahkan (Riana, 2009:386).

3. Medium: Prinsip Keteladanan

Media sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu. Praktik kepemimpinan di Majapahit menunjukkan bahwa bahasa sebuah medium, tetapi bahasa yang dimanfaatkan berasal dari media lain yang sudah menjadi bagian dari struktur masyarakat berupa penegakan prinsip-prinsip keteladanan. Kepemimpinan Hayam Wuruk tampak melalui ketekunannya memelihara tapa brata dan memegang teguh ajaran Sjiwa Budha (Riana, 2009:216). Warisan berupa *material culture* –seperti candi– menjadi bagian dari mekanisme komunikasi antara pemimpin dengan rakyatnya.

Tertulis, "Maka dibangun candi agar tanah Jawa bersatu kembali, agar Baginda serta kerajaan kuat tegak dikenal oleh dunia kemudian tidak meragukan, tanda Baginda berjaya memimpin negara bukti seorang raja besar yang berwibawa" (Riana, 2009:337). Kutipan itu menunjukkan candi sebagai media penyampai pesan tentang kepemimpinan, kebesaran, dan kewibawaan. Candi sebagai lambang tegaknya norma masyarakat, kekuatan negara, dan orientasi-orientasi yang jelas. Keteladanan ini disebut dengan Pangarananya, "Gelar Kebangsawanan"

seperti, *Sang tuhwarrya lekas niran pangaranarya yukti satirun*, artinya yang berhak menyandang gelar Arya adalah yang perbutannya benar-benar pantas diteladani (Riana, 2009:337).

Keutamaan raja meliputi: (1) setia pada ajaran Hindu untuk menciptakan kesejahteraan negeri (Riana, 2009:50), (2) memegang teguh tugas kepemimpinan dan politik (Riana, 2009:59), (3) memiliki tutur kata yang baik (Riana, 2009:61), (4) menciptakan ketertiban negeri (Riana, 2009:91), (5) menjadikan tempat berlindung (Riana, 2009:442), dan (6) memberikan hadiah kepada rakyat sebagai tanda bakti kepada Siwa (Riana, 2009:159). Adapun keteladanan Patih Gajah Mada digambarkan dalam sifat-sifat: (1) pemberani (*wira*), (2) bijaksana (*wicaksana*), (3) lihai (*naya*), (4) setia kepada atasan (*satya*), (5) ahli pidato (*wagmi wakpatu*), (6) tenang (*dhihotsaha*), dan (7) taat azas (*tan lalana*) (Riana, 2009:160).

Penegakan keteladanan itu dilakukan melalui bentuk-bentuk ritual tradisi masyarakat, misalnya upacara adat. Upacara menjadi bagian penting dalam penegakan kewibawaan pemimpin. Hal itu terlihat dalam halaman 324 tentang upacara penghormatan terhadap Raja Patni, orang tua Hayam Wuruk. Upacara ini digambarkan sangat meriah karena Raja menunjuk setiap atasannya menunjukkan bukti kesetiaan dan ketundukan dengan berbagai persembahan.

4. Pemeliharaan Masalah

Di dalam penegakan praktik-praktik kepemimpinan, tantangan yang muncul adalah ketidakpercayaan publik terhadap pemimpin. Ketidakpercayaan ini terjadi karena pemimpin tidak memiliki keteladanan. Penegakan keteladanan ini harus dirawat melalui mekanisme yang selalu awas terhadap musuh-musuh yang datang. Waspada ini akan membuat pemimpin selalu siap menghadapi tantangan. Kewaspadaan ini bermanfaat untuk menghadapi musuh. Menurut

NK, ketika musuh datang, para musuh dimusnahkan sehingga para lawan ketakutan (Riana, 2009:209). Ini merupakan strategi untuk *shock therapy* bagi siapa pun musuh yang hendak datang. Metode ini dipertontonkan agar kekuatan negara mampu memberikan efek terhadap musuh yang hendak datang. Dikatakan, karena tidak pernah main-main dengan musuh, maka "Yang berniat jahat ketakutan lalu pergi jauh" (Riana, 2009:244).

5. Warna dan Simbol Kekuatan

Kerajaan Majapahit sebagai sebuah kelompok besar diikat oleh simbol yang membuat masyarakat sebagai anggota kelompok merasa sebagai satu kesatuan. Simbol tersebut ditulis seperti ini: "Kereta maharaja Majapahit amat megah bercirikan gambar buah maja, kain *gringsinglobeng lewih* merah berhias lukisan mas tirai dan tabirnya (Riana, 2009:127)." Itu berarti bahwa gambar buah maja itu di atas kain yang berwarna merah tua yang berasal dari darah manusia dihiasi lukisan dari emas.

Buah maja melambangkan sebuah kesejahteraan yang ditegakkan di atas warnamerah tua. Merah tua melambangkan keberanian, ketegasan, dan kekuatan yang dimiliki untuk menegakkan kesejahteraan itu. Lambang itu bisa dimengerti oleh anggota kelompok.

Keraton juga bisa dibaca sebagai simbol penyatuan masyarakat. Digambarkan secara arsitektural bentuk istana Majapahit yang dikelilingi oleh tembok tinggi setelah ada parit yang dalam dan luas. Kendati keamanan dibuat berlipat-lipat, namun Raja membuat bangunan itu tidak tertutup oleh kunjungan rakyatnya.

6. Shared Value

Berdasarkan pembacaan, pemimpin haruslah mengembangkan nilai-nilai bersama sehingga setiap anggota bisa merasa nyaman. Sistem sosial yang sudah ada dianggap sebagai media untuk menginternalisasi nilai-nilai berdasarkan peran yang dimiliki. Sistem sosial yang terdiri atas kaum terdidik (*brahmana*), para

pejabat (*satriya*), pihak swasta (*waisia*), masyarakat bawah (*sudra*), dan orang buangan (*chandala*) merupakan mekanisme sosial yang terbentuk untuk mencapai nilai-nilai bersama. Sebagaimana ditulis, kaum agamawan berusaha dan mengatur kepentingan bersama (Riana, 2009:359).

Menurut NK, masing-masing kasta melakukan kewajiban masing-masing, bahkan *candhala meleca tucca*, orang buangan, remeh, nista, hina, menaati tata susila kewajiban sebagai rakyat dari suatu kerajaan besar. Masing-masing sistem sosial itu diikat oleh keutamaan yang disebut dengan pangarananya. Sistem itu memiliki kelas yang berbeda, tetapi memiliki semangat yang sama, yakni menjunjung tinggi keteladanan. Ketika berpidato di hadapan rakyatnya, pengarang NK menulis sebagai berikut.

“Janganlah kalian tidak setia bakti menjunjung duli Baginda Raja, tegakkan jiwa aryamu berbuatlah segala yang menyejahterakan desa-desa dengan maksimal, jembatan jalan raya pohon beringin bangunan-bangunan segala yang bersifat jasa harus dipelihara. Terutama perkebunan persawahan segala tanam-tanaman dipelihara kesuburannya, tanah-tanah desa dipertahankan dengan kuat agar selalu berguna, sehingga penduduk tidak minggat ke desa lain merambah tanah, tetapi segala peraturannya di-tujukan untuk kebesaran desa” (Riana, 2009:416-417).

Dalam bentuk konkret, hal itu terlihat dalam praktik makan. Segala kasta di tengah-tengah masyarakat memiliki larangan makan daging tertentu. Sistem larangan ini menghasilkan kategori daging yang baik dan yang buruk. Yang baik adalah kambing, kerbau, burung, rusa, tawon, dan ikan. Yang buruk adalah anjing, keledai, cacing, dan tikus.

C. Kepemimpinan dalam *Babad Tanah Jawi*

Babad Tanah Jawi adalah buku yang secara umum berisi tentang sejarah politik, mitos, realitas sosial. Secara etimologis, yakni berdasarkan pada *Kamus Pepak Basa*

Jawa, kata babad berasal dari bahasa Jawa yang berarti cerita sejarah (Mulyono, 2008: 22), kata tanah berarti tanah (Mulyono, 2008:437) dan Jawi mengacu pada kata Jawa (Mulyono, 2008:134). Mulyono juga menerakan kata Jawa dalam kamusnya. Kata itu mengacu pada wilayah, budaya, adat-istiadat, dan aliran. Pemilihan kata Jawi dalam judul diduga merupakan pemilihan diksi yang lebih halus dalam stratifikasi ungkapan bahasa Jawa. Berdasarkan keterangan di atas, maka kata babad tanah jawi memberikan pengertian tentang sejarah wilayah Jawa.

Babad Tanah Jawi ditulis secara naratif dalam bahasa dan huruf Jawa. Ketebalan naskah mencapai 470 halaman. Isi cerita tidak seragam, tetapi secara umum penulis BTJ menceritakan kepemimpinan pada masa Kerajaan Demak (abad ke-15) hingga Mataram Islam (abad ke-17). Penulisan sekuen dan kutipan dalam penelitian ini merupakan transliterasi dan translasi dari teks asli. Karena tidak berbentuk tembang, BTJ lebih mirip cerita fiksi dari jenis prosa.

1. Legitimasi: Ahli Perang dan Imam Agama

Babad Tanah Jawi berisi tentang sejarah kerajaan Jawa dalam kurun waktu lebih dari dua abad, yakni abad ke-15 hingga abad ke-17. Teks itu menceritakan sejumlah pemimpin yang menonjol pada masa itu, seperti Sultan Fatah, Sultan Pajang, Sultan Mataram, dan kepemimpinan VOC.

Legitimasi seorang pemimpin dapat dilihat dari ideologi yang digunakan dalam penulisan. Ideologi itu terlihat di dalam penyebutan gelar. Gelar untuk Pemimpin Mataram Senapati Ingalaga Sayidin Panatagama (Sudibjo, 1980:95). Gelar itu bisa diartikan secara harfiah, yakni pemimpin dalam peperangan dan pemimpin dalam agama. Sejumlah bukti menunjukkan bahwa kepemimpinan itu dimengerti sebagai penegakan ajaran agama. Seperti dikatakan Pangeran Puger ketika menanggapi pelbagai gejolak politik di Mataram: “Raja adalah alat Tuhan.

Dan lagi pula, saya tidak mempunyai niat hendak merebut negara Kartasura, saya hanya berniat mengasuh saja yang menjadi raja” (Sudibjo, 1980:343). Hal itu merupakan arti ideal yang disematkan oleh masyarakat pada awal abad ke-15. Gelar Trunajaya adalah Panembahan Maduretna Panatagama (Sudibjo, 1980:214). Gelar itu mengandung arti bahwa pemimpin haruslah menegakkan agama. Bupati di Jepara diberi gelar Tumenggung Martapura (Sudibjo, 1980:291). Setelah Sultan Agung, Mataram diperintah oleh Amangkurat pada 1603 (Sudibjo, 1980:255). Amangkurat berarti bertanggung jawab terhadap kejahatan.

Legitimasi juga dilakukan oleh para agen pengetahuan spiritual. Pemimpin bisa beroperasi setelah mendapatkan restu dari sunan yang tergabung dalam organisasi bernama Wali Sanga. Pada masa ketika kerajaan Demak berkuasa, yakni pada awal abad ke-15, Wali Sanga berdiri sebagai agen-agen kepemimpinan yang baru. Sunan Kudus disebut-sebut dalam risalah ini sebagai kekuatan yang membawahkan sejumlah Sultan di Jawa. Hal itu dibuktikan melalui cerita tentang mekanisme kepemimpinan Arya Panangsang yang mendapatkan legitimasi dari Sunan Kudus berikut.

Ketika itu, orang Jawa sedang banyak yang senang berguru soal agama Islam serta ilmu Kesaktian dan Kekebalan. Saat itu ada dua guru yang sangat terkenal, ialah Sunan Kalijaga dan kedua Sunan Kudus. Sunan Kudus tadi mempunyai tiga orang murid: 1 Pangeran Arya Panangsang Jipang, 2. Sunan Prawata, dan ketiga Sultan Pajang. Yang paling disayang adalah pangeran Arya Panangsang (Sudibjo, 1980:65).

Kata *murid* di sini mengacu pada hubungan hirarkis antara Sunan dengan para pemimpin di Jawa. Persoalan menjadi muncul ketika Sunan Kudus memiliki “keberpihakan” terhadap salah satu pemimpin. Keberpihakan itu kemudian membuahkan strategi untuk menyalahkan musuh. Di dalam penegakan kepemimpinan di Demak, Sunan Kudus

sekurang-kurangnya melakukan tiga tindak pembunuhan berikut.

- a. Pembunuhan terhadap Ki Ageng Pengging, putra dari pejabat Majapahit, karena dianggap tidak mau tunduk kepada Sultan Demak (Sudibjo, 1980:57). Ditulis bahwa Ki Ageng Pengging hanya ditusuk sikunya kemudian meninggal.
- b. Sunan Kudus menyuruh Arya Panangsang membunuh Sunan Prawata. Alasan yang dijadikan dasar adalah pengkhianatan (Sudibjo, 1980:66). Pembunuhan itu berhasil mendudukkan Arya Panangsang sebagai kekuatan baru menggantikan Demak.
- c. Perintah membunuh Sultan Pajang. Sunan Kudus memang menyuruh Arya Panangsang membunuh Sultan Pajang dengan cara licik, tetapi selalu gagal hingga Sultan Pajang mampu membunuh Arya Panangsang pada 1471 (Sudibjo, 1980:80). Sunan Kudus melihat bahwa cara tipu muslihat merupakan bagian dari skenario agar stabilitas keamanan tetap terjaga. Kegagalan itu karena Sultan Pajang mampu membaca kecurangan yang dijalankan oleh Arya Panangsang dan Sunan Kudus. Pertemuan yang dijadikan sebagai media penjejak Sultan Pajang ternyata gagal mencapai target.

Di dalam banyak hal, kesunanan berfungsi sebagai kekuatan alternatif dari sebuah pemerintah. Kekuatan ini merupakan alat legitimasi bagi seorang kelompok yang hendak menjadi pemimpin. Pesan-pesan yang diungkapkan pihak kesunanan merupakan pesan yang tidak bisa dilepaskan dari kekuatan politis, misalnya pesan dari Sunan Giri: “Kalian supaya memelihara eratnya persaudaraan; siapa yang memulai jahat semoga tidak selamat” (155). Pesan ini dibaca sebagai representasi dari institusi spiritual, tetapi hal itu jalan keluar ketika terjadi konflik antara Pajang dan Mataram.

2. Strategi: Perluasan dan Penumpasan

Kepemimpinan dilahirkan dari kesaktian, strategi, dan kesempatan. Mekanisme menjadi pemimpin harus melalui media tertentu agar sampai pada tujuan. Media ini disebut *getek*, yakni transportasi laut yang terbuat dari jajaran bambu. Getek

ini bisa bergerak sampai pada tujuan jika didorong oleh kekuatan. Berdasarkan BTJ, kekuatan yang dimaksud adalah buaya. Melalui getek, diharapkan penumpang akan melihat cahaya sebagai wahyu kerajaan. Wahyu ini disebut dengan pulung kerajaan (Sudibjo, 1980:60).

Istilah buaya ini merupakan sebuah simbol dari kekuatan yang menjadi pendorong seorang pemimpin. Buaya memiliki arti buas, predator, dan dapat diterjemahkan sebagai bagian dari kejahatan. Dengan kata lain, mekanisme kepemimpinan itu ditegakkan melalui media kejahatan untuk sampai pada target. Karena didorong oleh kekuatan buaya itu, seorang pemimpin harus waspada.

Berdasarkan perangkat birokrasi itu, pemimpin mampu melaksanakan target-target yang hendak dicapai. Target yang hendak dicapai dalam BTJ adalah perluasan wilayah. Cerita-cerita yang disampaikan menunjukkan kuatnya hasrat para pemimpin memperluas kekuasaannya. Hal itu dibuktikan dengan deskripsi pembangunan kekuatan yang dilakukan oleh Senapati Mataram untuk melepaskan diri dari Kesultanan Pajang. Selain mencari legitimasi melalui kekuatan adikodrati berupa hubungan dengan Nyai Rara Kidul (105), Senapati juga melakukan penghimpunan kekuatan secara empiris. Dia diperintahkan oleh penasihatnya agar membuat benteng.

Senapati mengumpulkan orang membuat batu bata untuk membangun sebuah benteng. Benteng pertahanan itu secara perlahan-lahan akan diisi oleh para pengikut yang kemudian dijadikan sebagai tentara. Hal itu dilakukan secara kontinu dalam rangka akumulasi kekuatan. Ketika kekuatan sudah memadai, Senapati memproklamakan diri sebagai sebuah kerajaan yang terpisah dari Kesultanan Pajang. Sebelumnya, Mataram telah dilihat oleh Kesultanan Pajang sebagai api yang sebesar "kunang-kunang" sehingga mudah disiram (Sudibjo, 190-135). Sunan Giri menjadi bagian legitimasi untuk kepemimpinan Senapati Mataram sehingga

pemimpin harus menjalin hubungan yang baik dengan Sunan (Sudibjo, 1980:134).

Hal itu terbukti ketika terjadi rencana perluasan wilayah oleh Senapati ke arah Timur. Pangeran Surabaya merasaterancam karena tidak mendapatkan dukungan dari Sunan Giri. Ancaman itu terbukti ketika Sunan Giri berhasil membuat perjanjian antara Pangeran Surabaya dan Senapati Mataram. Perjanjian itu dianggap oleh Sunan Giri sebagai tahap untuk penguasaan wilayah Surabaya. Strategi itu berhasil karena setelah perjanjian itu, Pangeran Surabaya takluk kepada Mataram (Sudibjo, 1980:134). Ramalan selalu menjadi bagian dari BTJ. Ketika Senapati ingin mengetahui masa depannya, masa dia pergi ke Sunan Giri dan bertanya. Sunan Giri kemudian berkata, "Suatu saat, Tuan menjadi rakyat, rakyat menjadi Tuan" (Gusti dadi kawula, kawula dadi Gusti) (Sudibjo, 1980:133).

3. *Shared Value* : Ketundukan, Kesaktian, dan Pembunuhan

Shared value ialah nilai-nilai yang dijadikan sebagai pegangan anggota kelompok. Istilah lain adalah nilai bersama. Karena menjadi pegangan, nilai itu memiliki keabsahan dan dianggap memiliki kebenaran atau keumuman pada masa itu. Nilai-nilai bersama yang dimaksud adalah sebagai berikut.

a. Ketundukan

Ketundukan menjadi bagian dari nilai-nilai yang ditanamkan di tengah masyarakat. Sebuah contoh didapatkan dari Ki Ageng Pengging yang tidak bersedia tunduk. Diceritakan, Ki Ageng di Pengging adalah seorang yang sangat sakti. Dia sangat disayang oleh Prabu Brawijaya. Dia memiliki anak bernama Kebokanigara. Akan tetapi kesaktian itu tidak dijadikan sebagai legitimasi penguasa Demak. Karena itu, Sultan Demak mencoba melalui mediasi Sunan Kudus. Sunan Kudus sendiri menggunakan perangkat agama sebagai medium untuk melancarkan strategi politik. Diceritakan bahwa di Kesultanan Demak, ada keturunan majapahit, sudah masuk

Islam, tetapi tidak pernah menghadap. Kendati sudah Islam, Sultan Demak menanyakan dua hal berikut.

- 1) Hanya masuk ibadah atau menyusun kekuatan politik?
- 2) Jika Ibadah, haruslah Sultan Pengging menghadap karena tunduk pada pemimpin adalah bagian dari ibadah.
- 3) Jika tidak menghadap, Sunan Kudus menyatakan bahwa itu berarti pemberontakan. Dan pemberontakan hanya memiliki satu hukuman, yakni mati (Sudibjo, 1980:51). Pada akhir cerita, Mataram memiliki musuh orang-orang dari Surabaya dan gagal menaklukkannya (Sudibjo, 1980:221).

Ketundukan menjadi *shared value* bagi masyarakat. Ketika ada kekuatan baru di Batavia, Sultan Agung langsung mengadakan penyerbuan. Sultan Agung mengirim Mandurareja untuk menyerang Jayakarta, tetapi gagal memasuki benteng VOC. Kegagalan itu membuat Sultan Agung mengirim utusan untuk membunuh mereka. Hal itu terjadi pada 1571. Sultan meninggal pada 1578 (Sudibjo, 1980:183). Penyerbuan itu tidak menghasilkan apa-apa sehingga Sultan kemudian menyatakan hal berikut.

Orang-orang Belanda kelak akan membantu anak turun saya, yang bertahta lestari sebagai raja. Jika kelak keturunan saya ada yang kalah dalam peperangan, mereka akan ditolong oleh orang-orang Belanda. Serangan-serangan saya sekarang ini hanya untuk memberikan peringatan agar di kemudian hari mereka lebih merasa takut (Sudibjo, 1980:180).

Pertemuan antara Belanda dan Mataram digambarkan melalui perbedaan adat. Raja Mataram yang mengundang orang Belanda ternyata tidak mau duduk bersila seperti para rakyat. Hal itu dianggap sebagai pembangkangan (Sudibjo, 1980:234). Akan tetapi basis kekuatan Mataram yang kurang itu akhirnya dapat dilumpuhkan Belanda.

b. Kesaktian

Kesaktian diklaim sebagai keutamaan. Setiap individu yang menapaki me-

kanisme kepemimpinan, maka individu itu haruslah memiliki kesaktian yang melebihi masyarakat umumnya. Hal itu dibuktikan oleh kekuatan Jaka Tingkir sebelum memerintah Pajang, kekuatan Ki Ageng Pengging yang berhasil dikalahkan oleh Sunan Kudus, kekuatan Senapati yang didukung oleh kekuatan Nyai Rara Kidul.

c. Pembunuhan

Penyelesaian pemberontakan adalah dengan cara membunuh para pelaku. "Tusukilah segera Endranata di pagelaran ini sampai mati (Sudibjo, 1980:172)", demikian kata Sultan Agung setelah mengetahui Demak merencanakan pemberontakan.

Dalam BTJ diceritakan bahwa Mataram ditegakkan dengan senjata, berupa keris dan tombak (Sudibjo, 1980:223). Penegakan ini membuat Mataram menjadi sangat besar (Sudibjo, 1980:242). Dicatat dalam BTJ, upaya perluasan wilayah dilakukan sepanjang waktu. Penumpasan pemberontakan dari Pati dilakukan pada 1551 (Sudibjo, 1980:150). Kehancuran kota Pati terjadi pada tahun 1570. Kejatuhan Kota Kediri juga dicatat pada 1601.

4. Kepemimpinan Mataram Berhadapan dengan Belanda

Pada abad ke-18, Belanda menjadi kekuatan baru di wilayah barat Indonesia. Kerajaan-kerajaan merasa terancam. Fakta historis menunjukkan bahwa kepemimpinan Mataram gagal mengusir Belanda dari Nusantara. Hubungan dengan Belanda sebagai kekuatan baru yang dimanfaatkan oleh Kerajaan (Sudibjo, 1980:302). Kekuatan VOC yang semakin besar membuat kerajaan-kerajaan mempertimbangkan posisi aman untuk bekerja sama dengan VOC.

Pangeran Puger dari Mataram mendapatkan surat dari VOC tentang ganti rugi peperangan sewaktu Sultan Agung. Pangeran Puger menjawab, "Karena tanah Jawa ini semua adalah milik raja, bahwa bumi yang mereka injak, air yang ia

minum, atau rumput, daun dan sebagainya itu apakah tidak ada harganya, jika kakang Prabu Amangkurat sudi memberikan harga? Apalagi orang Kumpeni itu sudah mereka sudah banyak mendapatkan keuntungan dari perdagangan di tanah Jawa, dan mereka di sini dihargai ... Orang kumpeni jika tidak mau menilai sawah dari kakang prabu, lebih baik mereka pergi dari tanah Jawa" (Sudibjo, 1980:329).

Di sini muncul benih-benih patriotisme. Pangeran Puger merasa bahwa tanah kekuasaan kerajaan itu juga mencakup wilayah yang didiami oleh VOC. Belanda digambarkan sebagai raksasa besar yang memiliki niat halus di belakangnya.

Perlawanan Surapati yang dilakukan secara fisik juga mengalami kegagalan. Cerita Surapati muncul di beberapa tempat (bagian) dengan penambahan dan pengurangan (Sudibjo, 1980:381). Kegagalan itu membuat Pasuruan jatuh pada 1631. Demikian pula hubungan kerajaan-VOC dengan Panembahan Herucakra di Madiun (Sudibjo, 1980:439).

Ketidakberdayaan pemerintah kerajaan menghadapi VOC itu membuat kerajaan harus melakukan negosiasi kerja. Pembagian kerja dilakukan antara penguasa pribumi dengan Belanda. Dikatakan, "Bahwa kupenuhi tidak diberi wewenang untuk angkat seorang bupati di daerah itu. Kumpeni hanya berhak mengawasi dalam pekerjaan. Apabila bupati itu menjalankan kesalahan kumpeni supaya melaporkan ke Kartasura. Sebab menjatuhkan hukuman atau kesalahan punggawa praja juga kumpeni tidak berhak" (Sudibjo, 1980:470).

5. Pengetahuan tentang Ramalan

Dalam legitimasi kepemimpinan, dibutuhkan para pandita yang mampu meramal. Di dalam naskah BTJ diungkapkan tentang ramalan-ramalan untuk hadirnya sebuah pemerintahan. Misalnya tentang kemegahan kerajaan Majapahit diramalkan dari sebuah intuisi tentang buah maja seperti pada kutipan berikut.

Jika nanti si suatu tempat ia menemukan sebatang pohon Kemaja berbuah hanya satu dan buah itu rasanya pahit, berhentilah dan berpangkallah di situ. Tempat itu kelak akan menjadi sebuah negeri besar (Sudibjo, 1980:23).

Demikian pula ramalan tentang kejatuhan seorang pemimpin. Pengarang BTJ menjelaskan relasi antara alam, pemerintahan, dan kepemimpinan. Relasi ini saling memberikan tanda untuk muncul dan tenggelamnya seorang pemimpin. Lihat kutipan berikut.

Wruhanira, ingsun kilintang, awewarah marang sira, nggonira manengkung ngeningaken paningal, negesa karasing hyang, ingsaiki wis tinarima ing Allah... Negarane nuli rengka, kerep grahana sasi lan surya. Lintang kemukus saben bengi katon. Gunung padha guntur. Udan awu utawa ladhu. Iku cirining negara bakal rusak (Sudibjo, 1980:225)

Artinya: "Aku ini bintang, mem-beri kabar kepadamu, maksudmu bersemadi khusuk, meminta kepada Yang Maha Kuasa, sekarang sudah diterima Tuhan ... Negara akan pecah. Tanda-tandanya Sering terjadi gerhana bulan dan matahari. Pada setiap malam terlihat bintang kumukus. Gunung Meletus. Hujan abu atau lumpur. Itu pertanda negara akan rusak (Sudibjo, 1980:102).

Senapati Mataram meramalkan sebuah transportasi mesin dengan menyatakan "Kelak, keturunanku tak ada yang menaiki kuda napas" dan Mataram menjadi kota ramai pada 1509 (Sudibjo, 1980:145). Mataram mendapatkan sebutan Metawis sebagai bagian dari kemashurannya (Sudibjo, 1980:589).

D. Perbandingan Model Kepemimpinan

Berdasarkan hasil pembacaan terhadap dua teks di atas, maka masing-masing memiliki model kepemimpinan yang khas dalam aspek legitimasi, medium, *problem solving*, *shared value*, serta kasus-kasus khas yang dihadapi

masing-masing pemimpin. Aspek-aspek yang dijelaskan di dalam dua teks itu dilandaskan oleh imajinasi ideologi yang berbeda. NK dilandasi oleh pada agama Siwa-Buddha sedangkan BTJ dilandasi oleh agama Islam. Pada bait pertama NK tertulis sebagai berikut.

Sembah sujud hamba yang selalu memuja Paduka Duli Bhatara, yang meresap dalam semadi bagai Siwa Budha dan merupakan jiwa dunia akhirat, Paduka Sang Sri Parwata (Giri Pati) pelindung si nista dan rajannya Sang Hyang Jagatpati, Paduka adalah raja sekalian dewa yang paling gaib menjadi kenyataan di atas dunia (Riana, 2009:51).

Kutipan itu jelas memperlihatkan orientasi spiritual yang tertuju pada agama Siwa Buddha. Karena nilai-nilai yang terkandung di dalam agama itu merupakan imajinasi yang paling suci dan tinggi, maka status dan perilaku raja merupakan manifestasi dari nilai tertinggi itu.

Sementara itu, bila dibandingkan dengan BTJ, nilai-nilai agama Siwa-Buddha tidak seketika hilang. Nilai itu masih terlihat di dalam penulisannya. Nilai tertinggi sebagaimana tertulis dalam BTJ adalah nilai Islam. Paragraf pertama sudah menunjukkan hal itu.

Buku ini menuturkan sejarah raja-raja di pulau Jawa, berawal dari Nabi Adam sebagai sumbernya. Nabi Adam menurut asal usul menurunkan Nabi Sis. Nabi Sis sendiri kemudian berputra Nur Cahaya. Nurcahaya menurunkan Nurasa. Dari Nurasa lahir putranya yang bernama Sang Hyang Wening. Sang Hyang Wening kemudian menurunkan sang Hyang Tungga. Kemudian Sang Hyang Tunggal berputrakan sang Batara Guru. Batara Guru berputra lima, diberi nama: Batara Sambo, Batara Brama, Batara Mahadhewa, Batara Wisnu dan Dewi Sri. Batara Wisnu, putra keempat dari Batara Guru, bertahta di suatu kerajaan di Pulau Jawa, bergelar Prabu Set. Istana Batra Guru itu yang disebut Suralaya (Sudibjo, 1980:7).

Pengarang BTJ memberikan silsilah tentang kerajaan tanah Jawa yang menggabungkan tradisi berikut.

Bagan 1: Asal Usul Nama Tokoh Imajiner Berdasarkan Asal Tradisi

Nama Tokoh	Asal Tradisi
Nabi Adam	Islam
Nabi Sis	Islam
Nur Cahaya	Islam
Nurasa	Islam-Jawa
Sang Hyang	
Wening	Jawa
Hyang Tungga	Hindu
Batara Guru	Hindu
Batara Sambo	Hindu
Batara Brama	Hindu
Batara Mahadhewa	Hindu
Batara Wisnu	Hindu
Dewi Sri	Hindu
Batara Wisnu, bertahta di Jawa	Hindu

Sumber: Analisis tekstual paragraf pertama BTJ.

Berdasarkan pemetaan tradisi itu, terlihat ideologi penulis dalam menyusun cerita tersebut. Berdasarkan dua kutipan di atas dapat diartikan bahwa ideologi Islam dijadikan sebagai dasar utama penyusunan naskah BTJ. Sementara itu, ideologi Hindu dan Jawa dijadikan sebagai unsur pemer kaya naskah ini. Temuan itu menurunkan sebuah justifikasi bahwa sistem kepemimpinan dalam BTJ mengalami Islamisasi dari sistem kepemimpinan terdahulu yang mendasarkan diri pada agama Siwa-Buddha.

Perbedaan landasan ideologi itu berimplikasi terhadap praktik kepemimpinan masing-masing teks. Legitimasi kepemimpinan dalam Kerajaan Majapahit didasarkan oleh pengetahuan spiritual agama Buddha, yakni tentang kehidupan manusia yang dijaga oleh para dewa di kayangan. Karena itu, seorang pemimpin bisa memberikan perintah kepada anggota karena pemimpin adalah titisan dewa. Dikatakan bahwa pemimpin

memahami segala rahasia pengetahuan alam dewa-dewa. Berbeda dengan legitimasi pemimpin pada masa Majapahit, legitimasi yang dimunculkan dari pemimpin Kerajaan Mataram didasarkan pada nilai-nilai keislaman yang disesuaikan dengan nilai-nilai pada masa lalu. Ditulis dalam BTJ bahwa raja mendapatkan legitimasi dari institusi keagamaan yang bernama kesunanan. Karena itu, gelar yang digunakan adalah "Senapati Ing Alaga Sayidin Panatagama", komandan perang dan pemimpin agama. Kesunanan memiliki kekuatan untuk menegakkan pemerintahan yang berdasarkan pada nilai-nilai keislaman.

Legitimasi yang diperoleh dalam kepemimpinan Majapahit maupun dalam Mataram dimanfaatkan untuk mendapatkan ketundukan bagi para anggota kelompok atau rakyat. Pada praktiknya, ketundukan pada masa Majapahit dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan rakyat, sedangkan ketundukan pada masa Mataram dimanfaatkan untuk memperoleh ketundukan lainnya. Kepemimpinan pada masa Majapahit memiliki dasar-dasar nilai ketundukan yang didukung oleh pemahaman tentang imbal balik dari ketundukan itu. Rakyat tunduk untuk mendapatkan hak mereka menjadi sejahtera. Sementara itu, kepemimpinan masa Mataram ketundukan dimanfaatkan untuk kekuasaan itu sendiri. Para penguasa tidak mengembalikan ketundukan dalam bentuk kesejahteraan, tetapi sebagai tolok ukur untuk melakukan perluasan wilayah. Dengan begitu, kesamaan itu terlihat dalam target-target kepemimpinan, tetapi tidak pada tujuan akhir dari kepemimpinan itu sendiri.

Nilai dasar yang berbeda membuat pemimpin Majapahit dan Mataram memiliki keputusan-keputusan yang berbeda pula. Bila keputusan pemimpin Majapahit berdasarkan pada norma keteladanan, keputusan pemimpin Mataram didasari oleh persetujuan kasunanan. Buktinya, keputusan penyerangan Majapahit ter-

hadap wilayah timur pulau Jawa didasari oleh semangat menegakkan keberanian memimpin perang untuk kejayaan negeri. Sementara itu, penyerangan Jipang terhadap Pajang memperoleh keabsahan dari Sunan Kudus. Demikian pula, penyerangan Jaka Tingkir menuju Demak juga mendapatkan legislasi dari Ki Ageng Pamanahan, seorang ahli ilmu agama. Pemimpin Majapahit memanfaatkan kekuatan norma yang terinternalisasi di tengah-tengah masyarakat, sedangkan pemimpin Demak dan Mataram memanfaatkan dukungan dari institusi agama.

Berdasarkan pembacaan terhadap karakteristik kepemimpinan Majapahit, Mataram, Pajang, dan Demak sebagaimana tertuang dalam naskah NK dan BTJ, dapat dilihat kesamaan misi terhadap perilaku anggota, yakni ketundukan. Misi ini dijabarkan dalam visi yang berbeda. Bagi Majapahit, visinya adalah kesejahteraan, sedangkan bagi Mataram adalah perluasan wilayah. Ketika penjabaran misi ini menemui masalah di dalam kelompok, mereka memiliki kesamaan pemecahan masalah, yakni penumpasan hingga punah. Pemimpin haruslah mampu mengenali musuhnya sehingga bisa membuat keputusan-keputusan yang benar untuk memperkuat kelompok. Ketika musuh datang, para pemimpin harus menghadapi dengan cara menumpas tanpa sisa. Penumpasan ini memberikan efek jera bagi individu atau kelompok yang bermaksud memberontak. Efek jera ini merupakan bagian dari mekanisme kepemimpinan yang bermanfaat untuk menumbuhkan ketundukan dalam diri anggota. Kasus yang dihadapi Mataram sangat khas, karena Mataram harus menghadapi kekuatan yang berasal dari luar, yakni VOC. VOC yang membawa persenjataan modern dan menerapkan politik kota benteng itu tidak berhasil ditaklukkan oleh Mataram. VOC melakukan politik perdagangan yang didukung oleh kekuatan prajurit yang dihimpun sedikit demi sedikit di Batavia. Ketika Mataram

mengetahui ada kekuatan baru, VOC sudah terlampaui kuat. Solusinya, Mataram bersedia bekerjasama dengan VOC dalam hal persediaan balatentara militer.

Berdasarkan sintesis tersebut, maka penjelasan di atas dapat diringkas dalam bagan di bawah ini.

tidak terjadi, pemimpin akan melakukan perang terhadap kelompok pembangkang. Perang dilakukan dengan cara penumpasan hingga ke akar-akarnya.

Adapun perbedaan terlihat dalam aspek legitimasi, strategi, dan medium. Dipandang dari sisi legitimasi, seorang

Bagan 2: Perbandingan Sistem Kepemimpinan dalam Kerajaan Mataram dan Majapahit

Tipe Sistem	Majapahit	Mataram
Legitimasi	Titisan Dewa Praktik Tripaksa	Kesaktian (Ing Alaga) Imam Agama (Panatagama)
Shared Value	Ketundukan untuk kesejahteraan	Ketundukan untuk perang
Medium Startegi	Prinsip Keteladanan Berbasis Norma	Institusi Sunan Berbasis dukungan politis
Problem Solving	Penumpasan	Penumpasan

Sumber: Analisis peneliti terhadap dua naskah.

E. Relevansi dengan Kepemimpinan Masa Kini

Berdasarkan hasil konfirmasi atas konstruksi teoretis tentang kepemimpinan di Indonesia, didapat hasil berupa perbandingan model-model kepemimpinan. Model Kepemimpinan Orde Baru memiliki kesinambungan dengan model-model kepemimpinan masa lalu dalam aspek transformasi nilai-nilai bersama dan pemecahan masalah kepemimpinan.

Transformasi nilai dari pemimpin kepada anggota kelompok dilakukan melalui penundukan sedangkan pemecahan dilakukan melalui penumpasan. Baik penundukan maupun penumpasan pada masing-masing model memiliki konteks yang berbeda, tetapi memiliki esensi yang sama. Kepemimpinan di Nusantara dengan begitu mensyaratkan adanya ketundukan dari anggota untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemimpin. Bila ketundukan

pemimpin Orde Baru menurunkan legitimasi dari dewa-dewa menjadi legitimasi yuridis yang didapat dari lembaga legislatif. Sementara itu, kesaktian fisik pada masa Mataram masih dimanfaatkan oleh kepemimpinan Orde Baru. Hal itu terbukti dalam tahapan-tahapan menjadi seorang pemimpin tampak melalui kekuatan fisik, yakni berupa militer sebagai ujung tombak. Sementara itu, medium penyampai pesan dari pemimpin kepada anggota adalah pranata Jawa yang bersumber pada harmoni atau kerukunan. Kerukunan menjadi istilah yang dimanfaatkan oleh pemimpin sebagai jembatan bagi internalisasi gagasan-gagasannya kepada anggota. Hal itu berbeda dengan model kepemimpinan Majapahit yang memanfaatkan pranata agama sebagai medium penyampai pesan. Sementara itu, bagi Mataram, pranata agama tidak dijadikan sebagai pegangan bersama, tetapi dijadikan sebagai media politis yang berada di bawah kepentingan kekuasaan.

Dalam kasus ini, medium yang dimanfaatkan oleh Kepemimpinan Orde Baru cenderung mengikuti model pada masa Majapahit, tetapi tidak memiliki internalisasi nilai yang memadai sehingga terkesan hanya sebagai permainan bahasa.

Sementara itu, strategi yang dimanfaatkan oleh Orde Baru lebih cenderung memanfaatkan birokrasi modern yang mengutamakan struktur dan mekanisme yang berbentuk piramida. Konstruksi tersebut lebih condong pada model kepemimpinan yang dikembangkan dalam model kepemimpinan Mataram sebagaimana terlihat dalam naskah BTJ. Konstruksi tersebut melemahkan sensitivitas pemimpin terhadap aspirasi rakyat. Kelemahan itu terbukti dengan kelengahan pemimpin Orde Baru yang selama ini mengalami desensitivisasi. Pemimpin yang menggunakan birokrasi yang panjang membuat dia kurang peka terhadap keadaan sekitar. Gambaran lengkap model kepemimpinan dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.

kayangan sebagaimana diyakini rakyat yang menganut agama Hindu. Manifestasi itu diwujudkan melalui perilaku Raja yang melaksanakan ibadah Tripaksa. Strategi kepemimpinan yang digunakan untuk memengaruhi rakyat adalah melalui norma keteladanan. Keteladanan merupakan cara yang disepakati oleh rakyat dan pemimpin. Sasaran yang hendak dicapai adalah pendudukan secara fisik dan nonfisik. Cara fisik adalah kekuatan prajurit yang menjaga wilayah dan memerangi setiap kejahatan. Cara nonfisik adalah melalui norma keteladanan yang diakui bersama. Perlawanan terhadap norma bersama adalah bentuk lain dari identitas musuh. Musuh dalam kepemimpinan Hayam Wuruk harus ditumpas habis.

Sementara itu, BTJ (1788) yang dikarang oleh Camat Braja mengisahkan tentang keruntuhan kerajaan Majapahit yang digantikan oleh Kerajaan Mataram. Legitimasi kepemimpinan dalam BTJ didasarkan pada kesaktian fisik (*Senapati Ingalaga*) dan kepemimpinan dalam

Bagan 3: Perbandingan Sistem Kepemimpinan Dalam Kerajaan Mataram, Majapahit, dan Orde Baru

	Majapahit	Mataram	Masa Kini
Legitimasi	Titisan Dewa	Kesaktian	Praktik militerisme Orde Baru
Shared Value Medium Strategi	Praktik Tripaksa Ketundukan Keteladanan Berbasis Norma	Imam Agama Ketundukan Institusi Sunan Dukungan politis	Yuridis Ketundukan Kerukunan Feodalisme Jawa Mataram
Prob Solving	Penumpasan	Penumpasan	Penumpasan

Sumber: Analisis peneliti terhadap dua naskah.

F. Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya tampak bahwa Representasi Kepemimpinan Majapahit, mengisahkan kepemimpinan Raja Hayam Wuruk (1351-1389). Legitimasi pemimpin berasal dari manifestasi Dewa yang berada di

agama (*sayidin panatagama*). Legitimasi itulah yang membuat rakyat harus memiliki nilai ketundukan terhadap pemimpin. Norma masyarakat berupa ketundukan itu dipelihara melalui institusi nilai yang berbentuk Kasunanan yang dimanifestasikan

melalui anggota organisasi Walisanga, yakni Sunan Kudus. Organisasi ini memproduksi nilai-nilai yang mendukung visi pemimpin. Ketika ketundukan tidak terjadi, pemimpin dalam BTJ melakukan penumpasan. Dalam kasus BTJ, ketika penumpasan mengalami kegagalan, pemimpin melakukan kerja sama.

Relevansi Kepemimpinan masa kini diperlihatkan dalam kepemimpinan Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun (1966-1998). Relevansi pada masa pasca-Orde Baru terlihat pada kelemahan pemerintahan dalam menjalankan strategi-strategi kepemimpinan. Pemecahan masalah sebagaimana dijelaskan dalam model NK dan BTJ mengacu pada penumpasan habis, sementara itu pemecahan masalah pada masa kini tidak dilakukan secara sungguh-sungguh. Jika lawan pada masa Mataram dan Majapahit adalah kaum pemberontak, lawan pemerintahan masa kini adalah para penjahat kerah putih, bromocorah, para mafia, koruptor, dan pelaku kartel.

Kesamaan kepemimpinan pada masa lalu dan masa kini terbukti dalam pencapaian nilai-nilai ketundukan sebagaimana diinginkan oleh pemimpin Orde Baru. Nilai yang dijadikan sebagai pegangan Orde Baru selaras dengan nilai di dalam BTJ dan NK. Kesamaan itu juga terlihat dalam aspek pemecahan masalah ketika musuh datang. Kepemimpinan Orde Baru memilih cara penumpasan yang sama dengan NK dan BTJ.

Perbedaan terletak pada aspek legitimasi dan medium komunikasi. Aspek legitimasi kepemimpinan Orde Baru memodifikasi model legitimasi Mataram, yakni kekuatan fisik dan nonfisik. Kekuatan fisik Orde Baru diwujudkan dalam bentuk kepemimpinan dalam militer dan nonfisik diwujudkan melalui legitimasi yuridis. Strategi komunikasi pemimpin kepada rakyatnya memanfaatkan struktur kepemimpinan sebagaimana yang terdapat dalam feodalisme kerajaan Mataram. Aspek feodalisme ini menjadi bagian dari strategi kepemimpinan.

Daftar Pustaka

- Heraty. Toeti. 1984. *Aku dalam Budaya*. Jakarta: Pustaka Jaya.
<http://jv.wikipedia.org/wiki/babad>, diunduh tanggal 2 Juli 2010.
<http://jv.wikipedia.org/wiki/kromoinggil>, diunduh tanggal 5 Juli 2010.
<http://jv.wikipedia.org/wiki/kromongoko>, diunduh tanggal 10 Juli 2010.
<http://www.sekolahvirtual.or.id/2010/03>, diunduh Tanggal 13 Februari 2011.
- Klann, Gene. 2007. *Building Character*. San Fransisco: John Willey Sons.
- Kompas. 2008. "Negarakertagama Diakui sebagai Memori Dunia," dalam *Kompas*. 28 Mei 2008.
- Kompas. 2008. "Indonesia Kian Dekati Negara Gagal," dalam *Kompas*. 7 Maret 2011.
- Mai, R. A. Ackerson. 2003. *The Leader as Communicator: Strategies and Tactics to Build Loyalty, Focus Effort, and Spark Creativity*. New York: American Management Association.
- Muljono, Slamet. 2008. *Kamus Pepak Basa Jawa*. Jakarta: Buku Kita.
- Paul, Richard W. dan L Elder. 2002. *Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Professional and Personal Life*. New Jersey: Prentice Hall.
- Riana, I Ketut (Penerjemah dan Transkriptor). 2009. *Kakawin Dēśa Warṇana uthawi Nāgara Kṛtagama*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Slametmulyana. 1979. *Negara Kretagama dan Tafsir Sejarahnya*. Jakarta: Bhratarata.
- Sudibjo Z.H. (Penerjemah dan Transkriptor). 1980. *Babad Tanah Jawi..* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suta, I Putu Gede. 2010. "Role of Intelligence in Leadership Communication," *The Ary Suta Center Series on Strategic Management*, April 2010.
- Zoetmulder, P.J. dan Robson, S.O. 2004. *Kamus Jawa Kuna Indonesia*. Terjemahan Darusuprta dan Sumarti Suprayitna. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.